JLEB: Journal of Law Education and Business
E-ISSN: 2988-1242 P-ISSN: 2988-604X
Vol. 3 No. 1 April 2025

Pengaruh Penerapan Akuntansi Sektor Publik Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah

Khairani Alawiyah Matondang[1] Raymon Pernando Pasaribu[2] Selpiana[3] Feny Amelia Sinaga[4]
Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Medan, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, Indonesia[1,2,3,4]
Emaail: alawiyah@unimed.ac.id[1] raymondpasaribu47@gmail.com[2] selpiana728@gmail.com[3] fenyamelia2005@gmail.com[4]

Abstract
Public sector accounting plays an important role in increasing transparency and accountability in government financial management. This study aims to analyze the impact of the implementation of public sector accounting on the quality of financial reports and government performance accountability. The research method used in the literature study, namely by searching for relevant articles and references, in scientific journals, books, and appropriate government regulations. The results of this study indicate that there is a positive relationship between the implementation of public sector accounting and the quality of government reports, namely the better the implementation of public sector accounting targets, the more accurate, relevant, and reliable financial reports will be produced. In addition, transparency in the preparation of financial reports can increase government accountability in managing state finances, and the understanding of accounting and compliance with accounting can minimize fraud. The existence of supervision of financial reports also has a significant influence in preventing fraud or financial irregularities. Therefore, it is expected that the implementation of this public sector accounting will optimally create government accountability and increase public trust in managing our country's finances.
Keywords: *Public Sector Accounting, Financial Statements & Government*

Abstrak
Akuntansi sector publik memegang peranan penting dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan pemerintah. Penilitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak dari penerapan akuntansi sector publik terhadap kualitas dari laporan keuangan dan akuntabilitas kinerja pemerintah. Metode penelitaran yang digunakan dalam studi pustaka, yaitu dengan melakukan pencarian artikel dan referensi yang relevan, dia jurnal ilmiah, buku, dan peraturan pemerintah yang sesuai. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang positif dari penerapan akuntansi sector publik kepada kualitas laporan pemerintahan yaitu semakin baik implementasi sasaran akuntansi sektor publik maka akan menghasilkan laporan keuangan yang semakin akurat, relevan, dan dapat dipercaya. Selain itu, transparansi dalam penyusunan laporan keuangan dapat meningkatkan akuntabilitas pemerintah dalam mengelola keuangan negara, Serta adanya pemahaman akuntansi serta kepatuhan dengan akuntansi dapat meminimalisir kecurangan. Adanya pengawasan terhadap laporan keuangan juga memiliki pengaruh yang signifikan dalam mencegah terjadinya fraud atau penyimpangan keuangan. Maka dari itu, diharapkan dari implementasi akuntansi sektor publik ini akan optimal tercipta akuntabilitas pemerintahan serta meningkatkan kepercayaan masyarakat dalam yang mengelola keuangan negara kita.
Kata Kunci: Akuntansi Sektor Publik, Laporan Keuangan, & Pemerintahan

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

PENDAHULUAN

Seiring dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat yang semakin rumit, tuntutan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam sektor publik terutama dalam konteks pemerintahhan semakin mendesak. Akuntansi sektor publik telah menjaadi

tulang px$*itu unggung dalam menopang tuntutan tersebut. Akuntansi sektor publik al penerapan akuntansi sektor publik yang telah memiliki standar dapat membantu pemerintah dalam penyusunan laporan keuangan yang berkualitas. Laporan keuangan yang berkualitas tidak hanya menggambarkan kondisi keuangan pemerintah secara akurat, tetapi juga mendukung pengambilan keputusan yang efektif oleh para pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, legislatif, dan masyarakat. Di Indonesia, penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang diatur pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010. PP ini menggantikan PP Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintaha menjadi salah satu langkah penting dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah. Dengan penerapan akuntansi sektor publik yang baik, diharapkan laporan keuangan pemerintah menjadi lebih relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami. Namun, dalam praktiknya, masih terdapat berbagai tantangan dalam penerapan akuntansi sektor publik, seperti keterbatasan sumber daya manusia, kurangnya pemahaman terhadap standar yang berlaku, serta kendala dalam sistem pencatatan dan pelaporan keuangan. Dalam jurnal ini, kami akan membahas bagaimana pentingnya penerapan akuntansi sektor publik terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah. Dengan memahami hubungan antara kedua hal tersebut, diharapkan hasil penelitian dapat memberikan kontribusi berupa pemahaman bagaimana sebenarnya pengaruh penerapan akuntansi sektor publik terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah.

Kajian Teori

Akuntansi Sektor Publik

Akuntansi sektor publik merupakan cabang akuntansi yang berkaitan dengan pencatatan, pelaporan, dan pengelolaan keuangan dalam organisasi yang tidak berpatokan pada laba, seperti pemerintah, lembaga, dan badan usaha milik negara (BUMN) yang memberikan layanan kepada masyarakat. Akuntansi sektor publik mencakup beberapa komponen seperti prinsip, standar, dan prosedur yang digunakan untuk mengelola keuangan organisasi yang dibiayai oleh dana publik. Akuntansi Sektor Publik merujuk pada praktik akuntansi yang diterapkan oleh entitas pemerintah dan organisasi publik untuk mencatat, menganalisis, dan melaporkan transaksi keuangan. Bertujuan untuk memberikan informasi yang akurat dan relevan tentang penggunaan dana publik, sehingga memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih baik oleh pemangku kepentingan *(admind3asp 2024).* Adapun pemahaman mengenai arti dari akuntansi sektor publik dari beberapa sumber:

1. Akuntansi sektor publik adalah suatu proses mengumpulkan, mencatat, mengklasifikasi, analisis, meringkas, serta membuat laporan transaksi keuangan untuk organisasi publik. *(Indrayani m.Ak. 2022)*
2. akuntansi sektor publik adalah mekanisme teknik dan analisis akuntansi yang diterapkan pada lembaga tinggi negara beserta departemen di bawahnya untuk penerapan pengelolaan berbagai dana masyarakat *(Indra Bastian 2014).*
3. akuntansi sektor publik adalah informasi baik dari pemerintah sebagai manajemen atau alat informasi bagi publik *(Mardiasmo 2021)*
4. akuntansi sektor publik merupakan kegiatan jasa dalam rangka menyediakan informasi kuantitatif yang bersifat keuangan berdasarkan entitas pemerintah yang berguna sebagai pengambilan keputusan bagi pihak-pihak yang berkepentingan *(Abdul Halim 2014).*

Adapun yang menjadi tujuan dari penerapan dari akuntansi sektor publik yakni:

1. Management Control. Yakin akuntansi sektor publik memberikan informasi yang benar-benar dibutuhkan dalam pengelolaan yang tepat, efisien dan ekonomis pada operasi dan pengalokasian sumber daya suatu organisasi atau lembaga.

2. Accountability. Accountability bertujuan untuk memberikan informasi yang berguna bagi manajer sektor publik dalam pembuatan laporan pertanggungjawaban bidang, divisi, ataupun sumber daya yang berada di bawah naungannya. Selain itu juga bertujuan untuk melaporkan berbagai kegiatan atas operasi pemerintahan dan penggunaan anggaran kepada publik. Berikut pula beberapa paparan mengenai tujuan dari penerapan akuntansi sektor publik secara umum yang telah dirangkum dari beberapa sumber:
   a. Memberikan informasi mengenai sumber, alokasi, serta penggunaan sumber daya keuangan.
   b. Menyediakan informasi yang berkaitan dengan kecukupan penerimaan periode berjalan sebagai pembiayaan semua pengeluaran.
   c. Menginformasikan jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan untuk kegiatan entitas pembuatan laporan sekaligus hasilnya yang sesuai.
   d. Menginformasikan posisi keuangan sesuai dengan kondisi entitas pembuatan laporan sesuai dengan sumber penerimaan dalam jangka pendek maupun panjang.

Menurut *Rany maulidia (2021),* Berikut adalah karakteristik akuntansi sektor publik yang penting untuk diketahui :

1. Berdasarkan penggunaan, akuntansi jenis ini digunakan oleh lembaga pemerintah pusat maupun daerah.
2. Dari sisi sifatnya, akuntansi bersifat khusus untuk organisasi non profit yang tidak menghasilkan laba.
3. Sedangkan dari fokus tujuan lembaga, akuntansi hanya menyajikan informasi pelayanan kepada publik untuk kesejahteraan mereka.
4. Dilihat dari lingkungan, lembaga atau sektor publik bergerak pada lingkungan turbulence dan sangat kompleks.

Laporan Keuangan

Menurut *sayoga Prasetyo (2024)* Laporan keuangan adalah ringkasan informasi keuangan yang disajikan secara sistematis dan terstruktur, yang mencerminkan hasil operasi, posisi keuangan, dan arus kas suatu entitas (perusahaan) dalam periode tertentu. Laporan keuangan disusun berdasarkan prinsip akuntansi yang berlaku umum, seperti Standar Akuntansi Keuangan (SAK) di Indonesia, atau International Financial Reporting Standards (IFRS) di dunia internasional. laporan keuangan sektor publik adalah dokumen yang menyajikan informasi tentang keuangan suatu entitas publik, seperti pemerintah pusat, pemerintah daerah, kementerian, lembaga pemerintah, dan badan usaha milik negara (BUMN).Laporan keuangan sektor publik bertujuan untuk memberikan gambaran secara menyeluruh tentang posisi keuangan, kinerja, dan arus kas dari entitas publik tersebut *(Khaula Sunastre 2023).* Laporan keuangan akuntansi sektor publik umumnya terdiri dari tiga elemen yakni;

1. Neraca: *Menurut Harahap (2009:107),* neraca atau daftar neraca disebut juga laporan posisi keuangan perusahaan. Laporan ini menggambarkan posisi aset, kewajiban dan ekuitas pada saat tertentu. Neraca atau balance sheet adalah laporan yang menyajikan sumber-sumber ekonomis dari suatu perusahaan atau aset kewajiban-kewajiban atau utang, dan hak para pemilik perusahaan yang tertanam dalam perusahaan tersebut atau ekuitas pemilik suatu saat tertentu *(Yolanda Fatrecia Kesuma 2013)*
2. Laporan Laba-rugi: Laporan laba rugi merupkan gambaran sekilas mengenai perkembangan usaha melalui informasi keuangan yang diperoleh dari tingkat pencapaian keuntungan maupun kerugian suatu entitas. Unsur-unsur utama laporan laba rugi adalah pendapatan dan beban *(Anastasia & Nanang 2020)*

3. Laporan arus kas: *Harnanto (2002:129)* menyatakan bahwa Laporan arus kas adalah laporan keuangan yang menyajikan informasi tentang penerimaan dan pengeluaran kas perusahaan dalam suatu periode akuntansi. Laporan arus kas merupakan laporan keuangan pengganti dari laporan perubahan posisi keuangan atau laporan sumber dan penggunaan dana.

Pemerintah

Istilah Pemerintah berasal dari kata "perintah" yang berarti menyuruh melakukan sesuatu. Sehingga dapat dikatakan bahwa Pemerintah adalah kekuasaan memerintah sesuatu negara atau badan yang tertinggi yang memerintah sesuatu Negara seperti kabinet merupakan suatu Pemerintah. Istilah Pemerintahan diartikan dengan perbuatan (cara, hal urusan dan sebagainya) memerintahkan *(SF Marbun 1997).*

Penerapan Akuntansi Sektor Publik

Sistem Akuntansi Pemerintah adalah sistem terpadu yang menggabungkan prosedur manual dengan proses elektronis dalam pengambilan data, pembukuan dan pelaporan semua transaksi keuangan, aset, utang dan ekuitas seluruh entitas Pemerintah. Dalam implementasi pengelola keuangan diharapkan para pengelola perlu memiliki pemahaman memadai tentang sistem akuntansi keuangan agar dapat menyajikan laporan keuangan yang handal. Sistem informasi akuntansi dalam sistem perencanaan dan pengendalian sektor publik mempunyai arti dan peran penting terkait pada fungsinya dalam pengukuran dan pengendalian. Salah satu upaya konkrit untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara adalah penyampaian ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Karakteristik kualitatif merupakan prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah yang memenuhi prinsip tepat waktu dan disusun dengan mengikuti standar akuntansi pemerintahan yang telah diterima secara umum. Ada beberapa hal harus dipertimbangkan dalam penerapan standar akuntansi *(Septiani, 2013),* antara lain:

1. Standar memberikan pedoman tentang informasi yang harus disajikan dalam laporan posisi keuangan, kinerja dan aktivitas sebuah organisasi bagi seluruh pengguna informasi,
2. Standar memberikan petunjuk dan aturan tindakan bagi auditor yang memungkinkan pengujian secara hati-hati dan independen saat menggunakan keahlian dan integritasnya dalam mengaudit laporan suatu organisasi serta saat membuktikan kewajaran,
3. Standar memberikan petunjuk tentang data yang perlu disajikan yang berkaitan dengan berbagai variabel yang patut dipertimbangkan dalam bidang perpajakan, regulasi, perencanaan serta regulasi ekonomi dan peningkatan efisien ekonomi serta tujuan sosial lainnya,
4. Standar menghasilkan prinsip dan teori yang penting bagi seluruh pihak yang berkepentingan dalam disiplin ilmu akuntansi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi pustaka atau kepustakaan yang dapat diartikan sebagai serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian menurut *Mestika Zed (2003).*data yang dikumpulkan melalui jurnal ilmiah, buku, laporan pemerintah,dan sumber terpercaya yang relavan dengan topik.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh penerapan akuntansi sektor publik terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah. Berdasarkan sumber sumber yang telah diteliti, penerapan akuntansi sektor publik memiliki dampak positif positif, terutama dalam transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan pemerintah. Paparan dari berbagai sumber mengenai dampak positif penerapan akuntansi sektor publik berikut memperkuat pernyataan diatas :

1. Berdasarkan *Yosi Mirawati 2020*
   - Akuntansi sektor publik, standar akuntansi pemerintahan, dan kualitas laporan keuangan desa dinilai baik oleh responden.
   - Terdapat hubungan positif antara akuntansi sektor publik dan kualitas laporan keuangan desa, dengan nilai korelasi sebesar 0,501 atau 50,1%. Artinya, jika akuntansi sektor publik meningkat, maka kualitas laporan keuangan desa juga akan meningkat.
   - Pengaruh akuntansi sektor publik terhadap kualitas laporan keuangan desa dikategorikan sebagai sedang.
2. Menurut *Esha Selvia Ayu Sella,dkk 2020:* Berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan Sistem Akuntansi akrual, Pemahaman Akuntansi, Ketaatan Pada Peraturan Perundangan dan Pengendalian Akuntansi secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Akuntabilitas laporan keuangan pemerintah. Namun Secara parsial variabel Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah tidak berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah, sedangkan variabel Pemahaman Akuntansi, Ketaatan Pada Peraturan dan Pengendalian Akuntansi berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
3. Menurut *Urip Santoso & Yohannes 2019:* Secara teoritis Penerapan Akuntansi Sektor Publik dan Pengawasan Terhadap Kual-itas Laporan Keuangan Instansi Pemerintah akan berpengaruh terhadap Akuntabi-litas Kinerja Instansi Pemerintah baik secara partial maupun secara bersama-sama.Sedangkan secara teoritis Penerapan Akuntansi Sektor Publik, Pengawasan TerhadapKualitas Laporan Keuangan Instansi Pemerintah, Akuntabilitas Kinerja Instansi Pe-merintah akan berpengaruh terhadap Pencegahan Fraud (tindakan kecurangan atau penipuan yang dilakukan secara sengaja) baik secara partial maupun secara bersama-sama.
4. Menurut *Nugraeni & M. Budiantara*
   - Penerapan standar akuntansi pemerintah dan akuntabilitas kinerja pada SKPD di pemerintah kota Yogyakarta baik. Sedang Kualitas laporan keuangan pada SKPD di pemerintah kota Yogyakarta sangat baik.
   - Standar akuntansi pemerintah tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja secara langsung, sedangkualitas laporan keuangan secara langsung berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja.Standar akuntansi pemerintah secara langsung berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.Standar akuntansi pemerintah dapat mempengaruhi akuntabilitas kinerja melalui kualitas laporan keuangan.

Berdasarkan sumber yang telah dikumpulkan, dampak positif dari Penerapan akuntansi sektor publik pada laporan keuangan dan akuntabilitas pemerintah dianggap kuat Dengan bukti tersebut. Akuntansi sektor publik yang baik akan membantu dalam meningkatkan transparansi dan keandalan laporan keuangan, dan akhirnya akan memperkuat akuntabilitas pemerintah. Studi menunjukkan bahwa semakin tinggi penerapan sistem akuntansi, pemahaman akuntansi, dan tingkat kepatuhan terhadap aturan, maka laporan keuangan yang dihasilkan lebih berkualitas. Pengawasan atas laporan keuangan juga penting untuk menjamin bahwa standar akuntansi diterimba dengan baik dan membantu dalam mencapai

keuangan yang lebih transparan dan akuntabel. Sebaliknya, laporan keuangan berkualitas rendah akan menurunkan akuntabilitas pemerintah karena tidak dapat menyediakan informasi yang baik dan benar kepada masyarakat. Kualitas laporan keuangan yang baik menjadi faktor utama dalam meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintah.

KESIMPULAN

Seiring dengan perkembangan zaman dan meningkatnya kompleksitas kebutuhan masyarakat, tuntutan terhadap transparansi dan akuntabilitas sektor publik, terutama pemerintah, semakin meningkat. Penerapan akuntansi sektor publik sebagai sistem pengatur pencatatan, pelaporan, serta pengelolaan keuangan di organisasi publik menjadi faktor utama dalam mewujudkan hal ini. Selain membantu dalam penyusunan laporan keuangan yang berkualitas, sistem akuntansi sektor publik juga dapat membantu mengoptimalkan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan diperatur dalam PP Nomor 71 Tahun 2010 di Indonesia diharapkan dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah. Namun, tantangan seperti keterbatasan sumber daya manusia, pengetahuan yang kurang tentang regulasi, serta bagian sistem pencatatan dan pelaporan keuangan masih menjadi kendala dalam implementasinya. Berdasarkan kajian teori dan hasil penelitian yang dikumpulkan, penerapan akuntansi sektor publik terbukti memberikan dampak positif terhadap kualitas laporan keuangan dan akuntabilitas pemerintahan. Penerapan sistem akuntansi yang baik membuat laporan keuangan pemerintah relevan, reliabel, komparabel, dan dapat dimengerti oleh pemangku kepentingan. Penerapan standar akuntansi yang jelas juga meningkatkan transparansi sehingga laporan keuangan dapat digunakan sebagai alat pengambilan keputusan yang efektif. Bahkan, hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman akuntansi, kepatuhan terhadap regulasi, dan pengawasan laporan keuangan menyumbang dalam meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintahan. Akuntansi sektor publik yang diterapkan dengan baik dapat mencegah fraud pada laporan keuangan pemerintah dan mulai mempersempit kemungkinan terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan keuangan negara. Oleh karena itu, penerapan akuntansi sektor publik yang optimal sangat penting untuk menghasilkan sistem keuangan pemerintahan yang lebih transparan, akuntabel, dan dapat dipercaya pemangku kepentingan.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Halim. (2014). Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah. Jakarta: Salemba Empat.

Anastasia, & Nanang. (2020). Akuntansi Keuangan. Jakarta: Penerbit Universitas Terbuka.

Bastian, Indra. (2014). Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar. Jakarta: Erlangga.

Harahap, Sofyan Syafri. (2009). Analisis Kritis atas Laporan Keuangan. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Harnanto. (2002). Akuntansi: Pengantar Laporan Keuangan. Yogyakarta: BPFE.

Indrayani, M. Ak. (2022). Dasar-dasar Akuntansi Sektor Publik. Bandung: Alfabeta.

Marbun, SF. (1997). Kamus Administrasi Negara. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Mardiasmo. (2021). Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: Andi.

Mestika Zed. (2003). Metode Penelitian Kepustakaan. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Nugraeni, & Budiantara, M. (2020). Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah dan Akuntabilitas Kinerja. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.

Prasetyo, Sayoga. (2024). Dasar-dasar Laporan Keuangan. Jakarta: Mitra Wacana Media